

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Turki adalah sebuah bangsa yang pernah berkuasa dan mencapai puncak kejayaan dengan sistem khilafah Islamiyah pada abad pertengahan yang dimunculkan dalam bentuk kerajaan dengan nama Turki Ustmani. Sejarah mencatat dalam kekuasaannya yang berlangsung lebih dari 5 abad, Turki mengalami pasang surut dimana Sultan sebagai pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pemerintahannya mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk dinamika yang terjadi di Turki. Turki Ustmani berdiri pada tahun 1300 M oleh Ustman putra Ertogrul, tepatnya setelah jatuhnya kerajaan Islam Seljuk dari serangan kekuatan Mongol yang mengakibatkan kekalahan dan kemunduran bagi kerajaan Seljuk. Ustman menjadi pendiri sekaligus Raja pertama kerajaan Turki Ustmani dan berkuasa penuh atas seluruh wilayah kekuasaannya. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Turki Ustmani, secara garis besar Turki terbagi kedalam 4 fase, yaitu Turki pada masa kejayaan, masa kemunduran, masa pembaharuan, dan masa revolusi ke bentuk sekularisme.

Kejayaan kerajaan Turki Ustmani dimulai sejak kepemimpinan Raja kedua berjuluk Sultan Orkhan I (1326-1359). Pada masa kepemimpinannya, beliau mendirikan akademi militer sebagai pusat pelatihan dan pendidikan yang melahirkan militer-militer yang cerdas dan tangguh sehingga beberapa daerah dikawasan Eropa berhasil dikuasainya. Setelah itu Sultan Murad I menggantikan kepemimpinan Sultan Orkhan dan berhasil memantapkan keamanan dalam negeri serta berhasil melakukan perluasan wilayah ke kawasan Eropa. Ekspansi yang dilakukan kerajaan Turki Ustmani menimbulkan kekhawatiran bagi kaum Kristen sehingga menyebabkan pecahnya perang di Kosovo pada tahun 1389. Peperangan tersebut berhasil dimenangkan oleh Turki Ustmani yang dipimpin oleh Sultan Murad I melawan Sijisman, pemimpin pasukan Kristen dari Eropa.

Sultan Bayazid I (1389-1403) kemudian naik tahta menggantikan Sultan Murad I. Dibawah kepemimpinan Sultan Bayazid I, Turki Usmani berhasil memperoleh kemenangan pada Perang Salib yang terjadi pada tahun 1394 di Nicapolas. Namun pada tahun 1402 Sultan Bayazid I menghadapi pemberontakan yang bersekutu dengan Timur Leng¹ dan menyebabkan kekalahan serta penahanan Sultan Bayazid I dan kedua putranya oleh pasukan Timur Leng. Sepeninggal Sultan Bayazid I, terjadi perebutan kekuasaan diantara ketiga putra beliau (Muhammad, Isa dan Sulaiman). Sultan Muhammad I akhirnya berhasil naik tahta dan memegang kekhalifahan Turki Ustmani. Sultan Muhammad I berhasil menyatukan kembali daerah kekuasaan yang pernah dikuasai oleh tentara Mongol. Sepeninggal Timur Leng pada tahun 1405, Turki Ustmani semakin memantapkan diri untuk mengamankan wilayah kekuasaannya.

Setelah Sultan Muhammad I meninggal dunia, Sultan Murad II (1421-1484) naik tahta menggantikan kepemimpinan beliau. Beliau memfokuskan periode kepemimpinannya untuk terus melakukan ekspansi wilayah kerajaan serta berupaya merebut Konstantinople yang menjadi pusat perdagangan dunia pada masa itu. Tetapi penaklukan Kota Konstantinople baru berhasil dilakukan pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad II yang bergelar Sultan Muhammad Al-Fatih, putra Sultan Murad II, pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinople menjadi ancaman besar bagi bangsa Eropa sekaligus menjadikan Islam dibawah naungan Turki Ustmani semakin berkembang pesat peradabannya.

Sepeninggal Sultan Muhammad II, kepemimpinan Turki Ustmani diserahkan kepada Sultan Bayazid II (1484-1512). Beliau lebih mengedepankan *tasawuf*² dibandingkan memperluas wilayah kekuasaan yang menyebabkan kontroversi hingga pada akhirnya beliau mengundurkan diri. Kepemimpinan beliau digantikan oleh Sultan Salim I (1512-1520) yang

¹ Pendiri kerajaan Islam Asia Tengah Dinasti Timurid

² Memperdalam ajaran agama dan meninggalkan sifat keduniawian

melakukan perubahan peta arah perluasan wilayah ke arah timur(Persia, Syiria, Afrika Utara). Selanjutnya Turki Ustmani dipimpin oleh putra Sultan Salim I, yaitu Sultan Sulaiman I (1520-1566). Sultan Sulaiman I merupakan Sultan yang termashur karena pada kepemimpinan beliau, Turki Ustmani berhasil menjadi penguasa yang adidaya serta menguasai setengah bagian dunia. Beliau dijuluki *Al-Qonuni*, atau orang-orang Barat menyebutnya *Sulaiman The Magnificent* yang berarti Sulaiman yang Agung dan Bijaksana. Pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman I, beliau sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengatur administrasi pemerintahan dengan sangat rapi dan baik sehingga mengantarkan Turki Ustmani sebagai kerajaan Islam terkuat dan paling berwibawa pada masa itu.

Masa keemasan Turki Ustmani perlahan mulai memudar setelah meninggalnya Sultan Sulaiman I tahun 1566 M. Beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Salim II (1566-1573). Kepemimpinan beliau sekaligus menandai awal terjadinya fase kemunduran Kerajaan Turki Ustmani. Pada masa itu Turki mengalami kekalahan perang melawan armada laut Kristen yang dipimpin oleh Don Juan di Selat Lipoton yang berada di kawasan Yunani. Kekalahan tersebut mengakibatkan Turki Ustmani kehilangan Tunisia. Tunisia berhasil direbut kembali pada masa kepemimpinan Sultan Murad III (1574-1595). Meski demikian, kekacauan politik serta pemberontakan-pemberontakan mulai terjadi di dalam kerajaan.

Sultan Muhammad III (1595-1603) yang naik tahta menggantikan Sultan Murad III tidak mampu menghadapi gejolak politik yang terjadi didalam Turki Ustmani, terlebih setelah Austria berhasil memukul mundur pasukan Turki Ustmani dalam pertempuran memperebutkan Wina. Pada tahun (1603-1617) Sultan Ahmad I naik tahta menggantikan Sultan Muhammad III, tetapi tidak dapat merubah banyak kondisi yang terjadi di Kesultanan Turki Ustmani. Demikian pula pada masa kepemimpinan Sultan Mustafa (1617-1618 dan 1622-1623), Sultan Usman II (1618-1622), Sultan Murad IV (1623-1640), Sultan Ibrahim (1640-1648), Sultan Mustafa III (1757-1774), dan Sultan Abdul Hamid (1774-1789 M) tidak mampu merubah

keadaan dalam menghadapi kemunduran yang dialami oleh Turki Ustmani. Turki Ustmani pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid mengadakan perjanjian dengan Catherine II dari Rusia, dimana Kerajaan Turki Ustmani diharuskan menyerahkan benteng-benteng yang ada di Laut Hitam, mengizinkan armada Rusia melewati Selat antara Laut Hitam dan Laut Putih, dan mengakui kemerdekaan Crimea. Posisi Turki Ustmani di dalam perpolitikan Internasional menjadi semakin merosot.

Pada dasarnya kemunduran yang dialami oleh kekaisaran Ustmani sejak kepemimpinan sultan Salim II sampai dengan Sultan Abdul Hamid I tidak terlepas dari sifat para Sultan yang berkuasa. Sejak kepemimpinan Sultan Salim II, para Sultan cenderung lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk berdiam diri di Istana dalam Topkapi Sarayi, sebuah Kubah kenikmatan yang disebut sebagai Dar-us Sadet atau gerbang kebahagiaan. Hal ini berakibat pada jalannya pemerintahan yang tidak efektif karena semua urusan pemerintahan dilimpahkan secara penuh kepada Wazir Agung yang ditunjuk oleh Sultan. Selain itu, diberlakukannya hukum pembunuhan saudara yang dibuat di kalangan *Ke-khilafah-an*, yaitu melegalkan untuk membunuh saudaranya demi memperoleh jabatan Sultan menunjukkan sifat serakah yang dimiliki para Sultan sehingga mengarah kepada kehancuran. Kebiasaan-kebiasaan lain seperti mabuk-mabukan dan menghabiskan waktu di Harem (tempat para selir berada) tidak menunjukkan perilaku sebagai Sultan yang seharusnya mementingkan urusan negara. Perilaku dan kebijakan yang dibuat oleh para Sultan di masa itu tidak selaras dengan konsep *khilafah Islamiyah* seperti yang dicontohkan oleh para pendahulunya menjadikan awal kemerosotan yang dialami oleh Kekhilafahan Turki Ustmani.

Kerajaan Turki Ustmani mulai beralih ke fase pembaharuan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk kesatuan militer baru yang disebut dengan Mansur, hal ini dimaksudkan untuk mengganti kesatuan militer Jenisari yang selalu memberontak dan digunakan oleh para Ulama sebagai angkatan bersenjata

untuk menentang Sultan yang berkuasa. Dalam keadaan Ke-*khalifah*-an yang semakin memburuk, Sultan Mahmud II berinisiatif untuk mengadopsi metode Eropa dalam bidang pendidikan dan kemeliteran agar dapat menyelamatkan kondisi Ke-*khalifah*-an. Tetapi pada dasarnya pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan bukan berasal dari tuntutan rakyat sehingga kebijakan yang dibuat menuai banyak protes dari kalangan yang ingin tetap mempertahankan tradisi lama atau anti-barat.

Masa pembaharuan ini terus berlanjut pada masa Sultan Abdul Majid I (1839-1861) yang dibantu para pejabat dan tokoh-tokoh pembaharu seperti Mustafa Rasyid Pasya, Mehmed Ali Pasya dan Fuad Pasya yang menghasilkan gerakan *Tanzimat*. *Tanzimat* merupakan upaya untuk mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Istilah *Tanzimat* dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh gerakan pembaharuan yang terjadi di Turki Ustmani pada pertengahan abad ke- 19. Gerakan ini ditandai dengan munculnya berbagai tokoh pembaharuan Turki Utsmani yang mengenyam pendidikan bidang pemerintahan, hukum, administrasi dan perdagangan di dunia Barat.

Setelah berakhirnya *Tanzimat* yang sukses mengurangi otoritas kekuasaan Sultan, muncul gerakan Ustmani Muda yang ditokohi oleh Ziya Pasya dan Namik Kemal antara tahun (1825-1888). Pada awalnya gerakan ini didukung oleh Sultan Hamid II yang pada masa itu berkuasa. Namun akhirnya gerakan ini ditentang karena dianggap menentang kekuasaan absolut Sultan serta berupaya untuk merubah *Khilafah Islamiyah* Turki Ustmani menjadi negara konstitusional. Pada fase tersebut muncul pro-kontra antara Sultan yang pada akhirnya tidak sepakat dengan perubahan sistem menjadi konstitusional, dengan pendukung gerakan *tanzimat*.

Berakhirnya pembaharuan pasca Ustmani Muda dilanjutkan dengan terbenuhnya gerakan Turki Muda yang berasal dari kalangan intelektual yang lari keluar negeri untuk memantapkan gerakan oposisi mereka. Tokoh yang terkenal dari gerakan ini adalah Ahmed Riza, Mahmed Murad dan Pangeran Sahabuddin. Ide pembaharuannya adalah membatasi

kekuasaan Sultan yang absolut. Mereka beranggapan bahwa Turki Ustmani mengalami kemerosotan karena tidak adanya batasan kekuasaan yang diberikan untuk Raja. Pada tataran ide pembatasan inilah nilai-nilai Barat mulai masuk dalam aspek format pemerintahan konstitusional. Di saat tim oposisi menginginkan perubahan sistem pemerintahan, para Sultan yang menjabat pada masa itu terus berupaya menentang untuk menyelamatkan kekuasaannya.

Pemikiran sekular yang diadopsi dari Barat mulai masuk ke tubuh pemeritahan *khilafah* Turki Ustmani di Era kepemimpinan Sultan Hamid II. Hal tersebut dimulai pada tahun 1876 dimana Gerakan Turki Muda dengan basis pergerakan pemikiran ideologi Barat berhasil memaksa Sultan Abdul Hamid II menerima Konstitusi 1876, sebuah konstitusi sekuler yang diadopsi dari Konstitusi Belgia. Sejak saat itu tanda-tanda keruntuhan Khilafah Islamiyah mulai dirasakan semakin didepan mata. Secara garis besar Khilafah Turki Ustmani mengalami stagnan dalam berpikir karena sebagian besar kalangan di Turki Ustmani berhenti melakukan ijtihad.

Pada tanggal 26 April 1909 M, Turki Muda yang berkomplot dengan Syaikhul Islam Mohammad Dia' uddin Afandi berhasil memberhentikan Sultan Abdul Hamid II dan menggantikannya dengan Sultan Muhammad Rasyid. Tetapi pada hakikatnya Daulah Islamiyah Turki Ustmani telah mengalami keruntuhan karena sepeninggal Sultan Abdul Hamid II menjabat sebagai Sultan, kepemimpinan Sultan digantikan oleh orang-orang dari kalangan Revolusioner Turki Muda. Hal tersebut semakin diperkuat dengan orang-orang yang berideologi sekuler liberal yang mengelilingi kehilafahan dan puncaknya adalah terpilihnya Midhat Pasya yang berasal dari kalangan Turki Muda sebagai Perdana Menteri

Pada tahun 1923 dominasi dari kalangan Turki Muda semakin kuat. Mereka berhasil sedikit demi sedikit menyebarkan dan meyakinkan gagasan dan ideologi liberal sekular di Turki Ustmani sehingga memudahkan Mustafa Kemal yang menjadi pemimpin gerakan tersebut melakukan perubahan secara drastis dan menyeluruh di Kekhalifahan Turki Ustmani

dengan menggantikan Syari'at Islam yang selama 5 Abad telah dijadikan oleh Turki Ustmani pedoman dalam bernegara, digantikan dengan ideologi sekular oleh Mustafa Kamal hanya dalam kurun waktu tahun 1909-1923.

Mustafa Kemal Attaturk, seorang militer Turki di masa Sultan Abdul Hamid II yang juga tergabung dalam Gerakan Turki Muda, yang berupaya merubah sistem pemerintahan Turki yang dianggap sudah tidak relevan. Beliau memandang bahwa sistem *khalifah* yang digunakan Turki Ustmani membawa kemunduran bagi dunia Islam disebabkan oleh kesalahan kaum Muslim yang didominasi oleh pemikiran irasional dan bersikap sepenuhnya menerima sehingga membuat kaum Muslim menjadi lemah tak berdaya. Atas dasar pemikiran tersebut, beliau bersama Gerakan Turki Muda menentang despotisme Sultan Abdul Hamid II. Attaturk dan rekan-rekannya menawarkan restrukturisasi politik untuk memperbaiki kondisi Turki.

Untuk memusatkan dan mengendalikan perlawanan lokal yang meluas dan bersifat spontan, beliau membentuk majelis nasional alternatif yang mewakili perlawanan Turki. Pada akhirnya, ke-*khalifah*-an turki Ustmani berhasil ditaklukkan oleh Mustafa Kemal Attaturk dan rekan-rekannya tahun 1923. Attaturk resmi menjadi presiden pertama di Republik Turki dengan sistem pemerintahan barunya, sekularisme, serta menggulingkan kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Attaturk menjadikan Turki sebagai sebuah negara modern yang demokratis yang berakar dari konsep semangat kontemporer dan nasionalisme. Beliau memusatkan perhatian pada pemajuan revolusi nasionalis melalui serangkaian pembaharuan politik. Attaturk berupaya mengembangkan penyelidikan rasional sebagai otoritas puncak dalam masyarakat dan mengaitkan peradaban dengan perkembangan teknologi dan perbaikan moral. Kebijakan-kebijakan sekuler yang dibuat oleh Attaturk yang bersifat sekularis terutama pada tiga bidang, yaitu sekularisasi negara, pendidikan, dan hukum. Kebijakan tersebut antara lain adalah:

1. Penghapusan kesultanan dan ke-*khalifah*-an digantikan dengan proklamasi Republik Turki dengan konstitusi yang baru
2. Penghapusan ketentuan Islam sebagai agama resmi di Turki, penghapusan sekolah-sekolah agama dan digantikan dengan sekolah khatib dan imam serta fakultas teologi di Universitas Istanbul
3. Penghapusan fungsi syekhul Islam dan Kementerian Urusan Agama dan Wakaf, digantikan dengan Direktorat Keagamaan serta Direktorat Jendral Yayasan Keagamaan sebagai wujud kontrol negara atas agama
4. Larangan mengenakan cadar
5. Mengganti hari libur dari hari Jumat menjadi hari Minggu
6. Mengganti tulisan Arab ke dalam format tulisan latin
7. Mengganti kalender Hijriyah menjadi kalender Masehi
8. Dll.

B. Rumusan Masalah

“Mengapa Turki melakukan revolusi sistem pemerintahan dari *khilafah Islamiyah* menjadi negara sekuler?”

C. Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori sekularisasi, khususnya teori sekularisasi yang dikemukakan oleh Ali Abd Al-Raziq yang membahas sekularisme di Turki.

Sekularisasi dipahami sebagai pemisahan antara urusan negara (politik) dan urusan agama, atau pemisahan urusan duniawi dan ukhrowi (akhirat). Seperti yang dijelaskan oleh Cornelis van Peursen, seorang Theolog dari Belanda yang

mendefinisikan sekularisasi sebagai pembebasan manusia “pertama-tama dari agama kemudian dari metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya”. Itu berarti “terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius dan religius semu.”³

Sedangkan menurut Surjanto Poespowardojo, pada hakikatnya sekularisasi menginginkan adanya pembebasan tajam antara agama dan ilmu pengetahuan, dan memandang ilmu pengetahuan otonom pada dirinya.⁴ Dengan demikian, manusia mempunyai otonomi untuk dapat berbuat bebas sesuai dengan apa yang ia kehendaki sesuai dengan rasionya. Atas dasar orientasi ilmiah, manusia berusaha untuk menemukan hal-hal yang baru agar dapat menangkap dan mengungkapkan realitas yang konkret. Sekularisasi tidak hanya melingkupi aspek-aspek kehidupan sosial dan politik saja, tetapi juga menyangkut ke aspek kultural, karena proses tersebut menunjukkan lenyapnya penentuan simbol-simbol integrasi kultural yang semakin lama membuat masyarakat terbebaskan dari pandangan-pandangan yang bersifat spiritual dan metafisis yang tertutup.

Dalam sejarahnya Sekularisasi muncul pada abad pertengahan di Eropa, tepatnya pada masa Renaissance dengan tujuan mengakhiri dominasi kekuasaan Gereja yang membuat Eropa mengalami masa-masa kegelapan. Pemisahan agama dan negara, menurut Swidler misalnya hanya representasi dari pemikiran Kristen. Sementara dalam Islam berlaku penyatuan agama dan negara. Adapun di kalangan Yahudi lebih cenderung ambigu, meskipun pandangan Swidler ini dapat diperdebatkan, sebab seperti dikatakan Davis, Yahudi lebih menerapkan penyatuan agama dan negara atau politik, sebagaimana mereka menggunakan agama untuk menjustifikasi klaim atas tanah Tepi

³<https://budieagung.wordpress.com>, diakses 20 Oktober 2015 pukul 05.00

⁴<https://budieagung.wordpress.com>, diakses 20 Oktober 2015 pukul 05.10

Barat jalur Gaza sebagai hadiah Tuhan. “ hak (atas tanah) ini diberikan kepada kami oleh Tuhan, ayah Abraham, Isaac dan Jacob”, kata Mencachem Begin.⁵

Dari kalangan muslim muncul tokoh yang berpendapat mengenai sekularisasi. Adalah Ali Abd al-Raziq, seorang ahli agama dan ahli politik yang merupakan hakim di pengadilan Syariat Al-Mansura yang terletak di Al-Azhar, yang memiliki pemikiran tersendiri mengenai sekularisasi khususnya pada *khilafah Islamiyah*. Beliau mengemukakan bahwa sejarah Islam tidak pernah mengharuskan sebuah negara menganut sistem *khilafah* dengan dipimpin oleh seorang *khalifah*. Atas dasar teori tersebut, Ali Abd al-Raziq berusaha menemukan konsep politik yang Islami namun memerlukan pemisahan antara agama dan politik dimana keduanya tidak mungkin dapat dipersatukan karena agama bersifat sakral, sedangkan politik lebih kepada permasalahan duniawi.

Dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi Al-Khilafah wa Al-Hukumah fi Al-Islam* (Islam dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan), beliau berpendapat bahwa agama Islam harus terbebas dari khilafah yang selama ini dipahami kaum muslimin, juga terbebas dari bentuk kejayaan dan kekuatan yang mereka bangun. Khilafah, sama halnya dengan pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasi negara adalah semata-mata murni rancangan politik yang tidak ada kaitannya dengan agama. Agama merupakan pedoman yang ditinggalkan kepada manusia untuk menentukan tindakan yang didasarkan kepada pemikiran rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik

Menurut Al-Raziq, *khilafah* merupakan suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak ada di tangan kepala negara atau kepala pemerintahan yang bergelar *khalifah*, pengganti Nabi Muhammad saw., yang memiliki kewenangan

⁵<http://blogspot.com/ilc> (islamic law community) stain pekalongan '06: ali abd roziq.

untuk mengatur kehidupan dan urusan umat-rakyat, baik keagamaan maupun duniawi yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.⁶ Dalam perjalanan sejarah, banyak penguasa Islam yang menggunakan gelar *khalifah* sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Kenyataan sejarah pula yang menunjukkan bahwa banyak *khalifah* yang berbuat semena-mena terhadap rakyatnya, bersifat kejam, bertindak tidak Islami, bahkan saling menumpahkan darah demi memperebutkan kekuasaan. Di antara *khalifah* yang *dzalim* dalam menjalankan pemerintahannya adalah Sultan Salim II dari Dinasti Turki Ustmani yang pemabuk dan cenderung mementingkan urusan diri sendiri dibandingkan urusan negara. Doktrin yang tertanam di masyarakat bahwa tunduk pada perintah *khalifah* berarti mematuhi perintah Allah dan melawan *khalifah* sama artinya dengan melawan Allah menjadikan Al-Raziq menentang konsep *khilafah Islamiyah*.

Pemikiran-pemikiran Ali Abd Al-Raziq muncul akibat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem *khilafah Islamiyah*, terkhusus atas apa yang dilakukan oleh *khalifah* nya dalam mempertahankan kekuasaannya. Pemikiran beliau muncul seiring dengan peristiwa Revolusi Turki pada tahun 1924 yang mengubah sistem *khilafah*-an Turki menjadi sekular.

Dalam proses pembaharuan dan revolusinya Turki semakin dengan tegas memisahkan antara hal yang berkenaan dengan urusan dunia dan urusan keagamaan baik merubah secara struktur pemerintahan, kurikulum pendidikan dan perekonomian maupun kegiatan politik dan sosial. Melalui reformasi Turki, pemerintah Turki berupaya untuk menasioalisasikan dan memodernisasikan Islam. Manifestasi yang paling nyata adalah penggantian azdan Arab dengan adzan berbahasa Turki yang

⁶ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*,... hlm. 116.

dikumandangkan dengan melodi yang digubah oleh sekolah musik, pembacaan naskah hari lahirnya Nabi Muhammad dan Khotbah Jum'at dalam bahasa Turki, dll. Secara umum reformasi tersebut telah mengubah wajah Turki yang memilih untuk meninggalkan masa silamnya dan berupaya untuk mengikuti paham Barat.

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan penyebab terjadinya revolusi sistem pemerintahan Turki dari khilafah Islamiyah menuju negara sekuler adalah karena :

1. Kegagalan khilafah dalam menjalankan pemerintahan pada tahun 1800-an sehingga memunculkan delegitimasi dari rakyat yang berakibat perubahan sistem pemerintahan menjadi Negara sekuler.
2. Konstelasi Internasional pada abad ke 18 – 19 M yang memunculkan Eropa sebagai kawasan adidaya.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, penulis memberikan batasan-batasan dalam menganalisa studi kasus yang sedang diteliti. Pembahasan pada skripsi ini akan dibatasi pada Dinamika Turki dalam menghadapi revolusi sistem pemerintahan dari Khilafah Islamiyah menjadi Negara Sekuler di era Sultan Mahmud II tahun 1807 sampai dengan Mustafa Kemal Attaturk tahun 1923 dengan menggunakan kacamata analisa teori sekularisasi.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Melalui studi pustaka, penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, koran, majalah, koran baik cetak maupun elektronik. Penulis mencoba untuk memahami dan menganalisa pokok masalah dalam skripsi ini berdasarkan sumber-sumber tersebut sehingga menghasilkan informasi yang akurat yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.

G. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk meneliti dan menganalisa revolusi sistem pemerintahan Turki dari era Khilafah Islamiyah menjadi Negara sekuler di masa pemerintahan Sultan Mahmud II sampai dengan Mustafa Kemal Attaturk.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami alur penulisan skripsi, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai Turki di era Khilafah Islamiyah karena Turki membangun peradaban Islam selama 5 abad Turki berhasil berkuasa dan mencapai puncak kejayaannya.

Bab III membahas mengenai revolusi Turki menjadi negara sekuler karena pada masa tersebut Turki melakukan perubahan yang sangat cepat dalam sistem pemerintahannya.

Bab IV membahas mengenai penyebab yang melatarbelakangi Turki melakukan revolusi sistem pemerintahan dari Khilafah Islamiyah menuju negara sekuler.

Bab V merupakan kesimpulan, yaitu hasil dari pembahasan keempat bab sebelumnya.